

Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri Anggur Merah (studi kasus di Desa Lukukamaru Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Eunike Cahya Pratama Rambu Kahi Bili¹⁾, Ni Nyoman Dewi Pascarani²⁾, I Putu Dharmanu Yudharta³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: cahyapratama77@yahoo.com¹⁾, dewi.pascarani@yahoo.com²⁾, p.dharmanu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Population growth from many years carries some effects in all aspects like education, health, economy and those are followed by problems that show up just like the problem that is caused by population growth which is the poverty problem. Poverty happens in every region in Indonesia especially in East Nusa Tenggara that even becomes the third poorest Province in Indonesia. East Nusa Tenggara Province Government takes a responsibility to solve poverty problem in their area with making an Anggur Merah Autonomic Village Program Policy Implementation which is targetting all poor villages in East Nusa Tenggara. This study uses a descriptive qualitative research methodology. In collecting data, the writer does a direct observation on the field to collect all primary data that is related with doing documentation study to collect the secondary data. Besides, the writer uses interview technique directly and indirectly that are related with this topic of research. The summary of this research is an Anggur Merah Autonomic Village Program Policy Implementation in Lukukamaru village since 2011 can be felt by the group society that has given donations which is consisted of 10 groups in first shift and 7 groups in second shift. In the implementation of this program, there is still a term disorder with a regulation that is agreed. Obstacles or challenges that must be solved are the Lukukamaru people's concern, a continuity of evaluation by the government in this village and supporting infrastructurs improvements of this program.

Keywords: public policy, public policy implementation, poverty

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang sering ditemui oleh negara-negara berkembang termasuk Negara Indonesia. Masalah kemiskinan di Negara Indonesia dapat nyata terlihat dari masalah kemiskinan yang terjadi di provinsi-provinsi salah satunya provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Prvinsi NTT merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke tiga terbesar di Negara Indonesia, berdasarkan realita kemiskian tersebut maka di tahun 2011 pemerintah Provinsi NTT membuat program penanggulangan kemiskina dengan sasaran desa-desa miskin, program ini dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NTT dan dilimpahkan untuk dilaksanakan oleh Bappeda provinsi NTT dibantu Bappeda di kabupaten dan dana untuk program ini berasal dari APBD.

Ditahun pertama program ini dijalankan pemerintah Provinsi NTT memilih Desa Lukukamaru yang berada di Kabupaten Sumba Timur untuk menerima dana program ini, Desa Lukukamaru dipilih karena memiliki tingkat KK miskin yang

tinggi, infrastruktur desa yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, pembanguna dibidang kesehatan yang rendah serta merupakan desa tertinggal dan kurang memiliki akses pembangunan, desa Lukukamaru juga telah memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi.

Program ini dijalankan oleh Bappeda Kabupaten Sumba Timur dan dibantu PKM yang terpilih dengan berpedoman pada Pergub NTT Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah dan Pergub NTT Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Program Anggur Merah.

Sejak dilaksanakan tahun 2011 program Anggur Merah di Desa Lukukamaru tidak luput dari masalah yang menghambat berjalannya program. Berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan dilapang ditemui masalah yang menghambat program meliputi : pertama, masalah kesadaran masyarakat dalam pengembalian dana program. Kedua, akses

yang sulit dan jarak rumah warga yang jauh. Ketiga, sumber daya alam untuk mendukung program yang sulit didapat. Dan keempat, aturan yang tidak digakkan oleh implementor program.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian mengenai implementasi kebijakan program Anggur Merah ini guna mengetahui implementasi program, maka dilaksanakan penelitian yang berjudul "**Implementasi Program Desa Mandiri Anggaran Untuk Masyarakat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) studi kasus di Desa Lukukamaru Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT**".

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut William N Dunn (dalam Syafei 2006:106) adalah suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintahseperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Implementasi Kebijakan

Menurut Gordon dalam Pasolong Implementasi Kebijakan berkenaan dengan kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Model George C. Edward III (2009:31) yang terdiri dari 4 bagian yaitu:

1. Komunikasi, menurut Edward komunikasi berkaitan dengan penyampain program kepada kelompok asaran agar dipahami dengan baik.
2. Sumber Daya, berkaitan dengan penunjang program yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, berkaitan dengan karakteristik dari implementor yang dapat dilihat dari kejujuran dn tanggung jawabnya dalam melaksanakan program.
4. Struktur birokrasi, berkaitan dengan yang bertigas mengimplementasikan program dan standar oprasional yang dibrlakukan dalam program.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wrihatnolo, pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Ada tiga tahap

pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowito dalam buku Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Pembardayaan Masyarakat (2007:2) yaitu, tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari wawancara langsung dan tidak langsung dengan informan, dokumentasi dan arsip. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Bappeda Kcamatan Sumba Timur dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data diperoleh dengan 4 tahap yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan terakhir penarikan kesimpulan. Penyajian data menggunakan teknik penyajian kualitatif dengan text bersifat naratif.

4. Hasil dan Pembahasan

Imlementasi Program Desa Mandiri Anggur Merah (studikasu di Desa Lukukamaru Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi NTT)

Program Desa Mandiri Anggur Merah adalah program bantuan dana ke desa-desa miskin yang dibuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terjadi di aparovinsi NTT. Program ini dicanangkan langsung oleh gubernur NTT dan dilimpahkan kepada Bappeda Provinsi NTT dengan dana yang bersasl dari APBD. Pelaksanaan program ini dibantu oleh Bappeda di kabupaten dan tiap desa penerima dana program mendapat dana sebesar Rp 250.000.000.

Tujuan program ini yaitu menurunkan angka kemiskinan di desa-desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,dengan memberdayakan warga desa untuk menggunakan dana program sesuai dengan karakteristik desa yang bisa digunakan untuk menjalankan program.

Dalam pelaksanaannya di Desa Lukukamaru akan dibantu oleh seorang Pendamping kelompok masyarakat (PKM) yang talah dipilih langsung oleh Bappeda Kabupaten Sumba Timur berdasarkan proses seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam Pergub. Dalam pelaksanaan program mengikuti pedoman yang telah tertera dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman

pelaksanaan dan penyaluran dana program.

Komunikasi

Dalam komunikasi dilihat siapa implementor dan pengagas program Anggur Merah. Program Anggur Merah ini digagas oleh Gubernur Provinsi NTT dan implementornya yaitu Bappeda Provinsi dibantu Bappeda Kabupaten. Berkaitan dengan peraturan mengenai program Anggur Merah ini diuat oleh pemerintah Provinsi dengan berpedoman dengan adanya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah sehingga lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman Program Anggur Merah. Pada tahap perencanaan program telah diputuskan bahwa sasaran dalam program ini yaitu desa-desa miskin dan tertinggal dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan program maka dilakukan sosialisasi secara terus menerus ke desa-desa yang dilakukan langsung oleh pihak Pemerintah. Sosialisasi dilakukan juga oleh pihak koperasi dan bank NTT serta PKM yang bertugas di desa.

Sejak dilaksanakan pertama di Desa Lukukamaru pada tahun 2011, terdapat 10 kelompok masyarakat yang menerima dana program, dimana setiap kelompok terdiri dari 7-10 anggota masyarakat. Sejak diberlakukan program ini tidak luput dari masalah pengembalian dana program sehingga mengakibatkan diperguliran kedua kelompok penerima dana program menjadi berkurang menjadi 7 kelompok saja dikarenakan 3 kelompok bermasalah dalam pengembalian dana program yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan suatu program termasuk dalam implementasi program Anggur Merah. Sumber daya bisa berwujud sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi dari implementor dan pemilihan sumber daya manusia yang akan terlibat. Dalam perekrutan PKM Anggur Merah telah diatur dalam Pergub sayarat dan alur seleksi yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pemilihan PKM, Bappeda telah melaksanakan proses seleksi sesuai dengan tahapnya dan juga memberikan pelatihan sebelum PKM tersebut ditempatkan ke desa. PKM juga telah memenuhi syarat administrasi dan juga harus seorang sarjana minimal D3.

Sumber daya alam merupakan aspek pendukung program yang dapat membantu keberlangsungan program, namun sumber daya alam yang terdapat di desa Lukukamaru sangat terbatas dan sulit dijangkau karena keberadaannya yang jauh dari pemukiman warga desa Lukukamaru. Kesulitan memperoleh sumber mata air ini dikarenakan jalan menuju mata air yang jauh dan rusak parah sehingga menyulitkan warga desa dalam memperolehnya, hal ini mengakibatkan program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Sumber daya finansial berkaitan dengan dana yang dipergunakan dalam program. Program Anggur Merah didanai dari APBD dengan jumlah dana tiap desa penerima yaitu sebesar Rp 250 juta, dana tersebut dikelola oleh pihak desa penerima dan tujuan akhir dari program yaitu terbentuknya koperasi desayang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga desa.

Disposisi

Disposisi menurut Edward yaitu yang berkaitan dengan karakteristik dari implementor, dimana apabila seorang implementor memiliki kecenderungan sifat positif dan mendorong terlaksananya program maka kemungkinan besar sebuah program akan berhasil dan begitu sebaliknya. Disposisi dapat dilihat dari kejujuran dan tanggung jawab dari implementor yang dalam hal ini Bappeda, kejujuran dilihat dari transparansi laporan yang diberikan dan tanggung jawab dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Bappeda sangat transparan dalam memberikan laporan pelaksanaan dan laporan penggunaan dana program, serta melaksanakan program sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pergub 33 Tahun 2010 dan Pergub 37 Tahun 2012.

Sejak dilaksanakan di Desa Lukukamaru tahun 2011, program ini tidak semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam hal sanksi yang diberikan apabila ada pihak yang melanggar dan menghambat keberlangsungan program maka harus diberikan sanksi. Dalam realitanya 3 kelompok yang bermasalah dalam pengembalian dana program belum ditindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Hal ini mengakibatkan tidak adanya rasa disiplin dalam pelaksanaan program. PKM hanya melakukan pendekatan kepada warga yang bermasalah, namun pendekatan yang dilakukan juga tidak bisa berjalan maksimal. Dikarenakan terhambat

akses dan jarak rumah-rumah warga yang jauh menyusahakan PKM untuk menemui 3 anggota kelompok yang bemasalah tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang terdapat di Bidang Statistik dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sumba Timur sebagai implementor dalam program Anggur Merah telah diatur dengan baik dimana tidak terdapat rentan kendali yang panjang sehingga tidak mengakibatkan masalah komunikasi diantara pegawai Bagian Statistik Dan Pelaporan. Sedangkan dalam standar yang digunakan dalam implementasi tidak berdasarkan SPO melainkan berdasarkan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 dan Pergub Nomor 37 Tahun 2012.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Anggur Merah di Desa Lukukamaru

Terdapat beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan program Anggur Merah di Desa Lukukamaru yaitu:

1. Rendahnya kesadaran warga desa dalam mendukung berjalannya program. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota kelompok penerima dana program yang sering terlambat menyetorkan uang program bahkan ada 3 kelompok yang sampai sekarang masih menunggak uang program. Kesadaran yang rendah ini juga terbukti dengan setiap tangga pengembalian uang program harus PKM yang berkeliling untuk menginformasikan program ke rumah-rumah anggota penerima dimana seharusnya warga sendiri yang datang untuk menyetorkan ke kantor desa. Hal ini menyulitkan PKM yang harus berkeliling dari satu ke satu rumah anggota kelompok penerima yang jaraknya berjauhan dengan kondisi jalan desa yang rusak.
2. Akses yang sulit dan jarak rumah warga yang jauh, hal ini berkaitan dengan kondisi jalan yang terdapat di desa Lukukamaru, kondisi jalan sangat rusak dengan struktur jalan berbatuan lepas dan sangat sulit dilalui apabila turun hujan. Jarak rumah warga yang jauh juga

menghambat jalannya program, hal ini dikarenakan warga anggota kelompok malas untuk berjalan jauh ke kantor desa pada saat waktu pengembalian dana program.

3. Kesulitan memperoleh sumber daya alam, hal ini berkaitan dengan sulitnya memperoleh sumber air di desa Lukukamaru yang hanya terdapat satu mata air yang jaraknya dari pemukiman belasan kilo dengan kondisi jalan menuju mata air yang rusak parah dan tidak dapat dilalui saat musim hujan.
4. Aturan yang tidak ditegakkan, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang tidak semuanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam pergub dalam hal sanksi yang harus diberikan kepada pihak yang melanggar aturan yang ditetapkan. Dalam hal ini 3 kelompok yang bermasalah sampai sekarang belum diberikan sanksi sama sekali dan menghambat berjalannya program dan mengurangi jumlah kelompok penerima di perguliran kedua yang harusnya 10 kelompok menjadi hanya 7 kelompok.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka kesimpulan yang dapat peneliti jabarkan adalah:

1. Implementasi kebijakan program Desa Mandiri Anggur Merah di Desa Lukukamaru dari tahun 2011 walau telah membantu perekonomian warga desa namun belum berjalan dengan baik secara keseluruhan, hal ini terbukti dengan adanya masalah dalam pengembalian dana program dan tidak adanya tindakan yang dilakukan dalam menyikapi masalah mengembalian dana program oleh 3 kelompok bermasalah tersebut.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program Anggur Merah di Desa Lukukamaru yaitu kesadaran warga desa yang rendah dalam melaksanakan program, akses dan jarak rumah warga yang jauh, kesulitan dalam memperoleh sumber daya air yang penting dalam pelaksanaan program. faktor Penghambat diatas mengakibatkan program yang masih berjalan sampai sekarang masih jauh dari kata maksimal.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradikma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Nusantara

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Huraerah, Abu, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat : Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung : Humaniora

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Madia

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offest

Pasolong, Herbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Prasowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing